Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Vol 05 No 02 Agustus 2024 (1-12)
https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/index
**Prefix** 10.47134

# Peran Dinas Koperasi Ukm Perindustrian Dan Perdagangan Kota Sawahlunto Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Masyarakat (Ikm) Di Desa Balai Batu Sandaran

**Aldiniatul Islam[1], Fitri Eriyanti[2]**
[1,2] Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran penting IKM dalam perekonomian lokal, khususnya IKM serai wangi di Desa Balai Batu Sandaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun peran sentral yang dimainkan oleh IKM tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal usaha, akses pasar, izin legalitas produk, dan keterampilan manajerial. Oleh karena itu, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Koperindag) Kota Sawahlunto diharapkan mampu memberikan dukungan yang signifikan melalui berbagai program pemberdayaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran Dinas Koperindag Kota Sawahlunto dalam pemberdayaan IKM di Desa Balai Batu Sandaran. Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif di Desa Balai Batu Sandaran. Data-data yang diperoleh dikumpulkan melalui hasil observasi, proses wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat dilihat dari tiga indikator peran yaitu peran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Kemudian faktor pendukung dalam memberdayakan IKM serai wangi di Desa Balai Batu Sandaran yaitu adanya fasilitasi sumber daya finansial dan sarana prasarana pendukung dalam memproduksi produk serai wangi. Sedangkan faktor penghambatnya terdiri dari minimnya kerja sama dan kolaborasi dinas dengan pihak-pihak lain, belum adanya izin legalitas produk, minimnya pelatihan yang diberikan, serta susahnya menyamakan *mindset* atau pola pikir pelaku IKM serai wangi. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Koperindag Kota Sawahlunto telah melaksanakan perannya dalam memberdayakan IKM serai wangi di Desa Balai Batu Sandaran. Akan tetapi peran yang dilaksanakan tersebut masih kurang optimal dalam penyelenggaraannya.

**Kata Kunci:** Peran, Pemerintah, Pemberdayaan IKM

DOI: https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.134
*Correspondence: Aldiniatul Islam
Email: aldiniatuli@gmail.com

Received: 12-06-2024
Accepted: 07-07-2024
Published: 11-08-2024

**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

***Abstract:*** *This research is motivated by the important role of IKM in the local economy, especially citronella IKM in Balai Batu Sandaran Village in improving community welfare. However, the central role played by SMEs still faces various obstacles such as limited business capital, market access, product legal permits, and managerial skills. Therefore, the Sawahlunto City Industry and Trade SME Cooperative Service (Dinas Koperindag) is expected to be able to provide significant support through various empowerment programs. The aim of this research is to describe the role, as well as supporting and inhibiting factors, in implementing the role of the Sawahlunto City Cooperative Industry and Trade Service in empowering SMEs in Balai Batu Sandaran Village. In this research, the author used a qualitative approach with descriptive methods in Balai Batu Sandaran Village. The data obtained was collected through observations, interview processes and documentation studies. The results of this research can be seen from three role indicators, namely the role of regulator, dynamist and facilitator. Then, the supporting factors in empowering citronella SMEs in Balai Batu Sandaran Village are the facilitation of financial resources and supporting infrastructure in producing citronella products. Meanwhile, the inhibiting factors consist of the lack of cooperation and collaboration between the department and other parties, the lack of legal product permits, the lack of training provided, and the difficulty of matching the mindset of*

*citronella IKM actors. So it can be concluded that the Sawahlunto City Cooperative Industry and Trade Service has carried out its role in empowering citronella SMEs in Balai Batu Sandaran Village. However, the role carried out is still less than optimal in its implementation.*

***Keywords:*** *Role, Government, Empowerment of SMEs*

## Pendahuluan

Jika dilihat dari sisi ekonomi, Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain yang dapat dilihat dari tingginya angka pengangguran, rendahnya kekayaan penduduk, dan tingginya angka kemiskinan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mendorong ekspor komoditas unggulan daerah yang diminati mancanegara, seperti tanaman atsiri. Salah satu tanaman penghasil atsiri penting adalah serai wangi. Minyak serai wangi dihasilkan dari daun dan batang tanaman tersebut. Kualitas minyak ini ditentukan oleh karakteristik alaminya dan tingkat kemurnian. Minyak yang tidak memenuhi standar mutu akan dijual dengan harga rendah (Gafur, 2022). Serai wangi *(Cymbopogon nardus)* merupakan salah satu sumber minyak atsiri yang banyak dikembangkan di Indonesia karena memiliki potensi bisnis yang besar.

Desa Balai Batu Sandaran sebagai salah satu desa di Kota Sawahlunto mempunyai potensi untuk membudidayakan tanaman serai wangi. Hal tersebut dikarenakan lebih dari setengah luas lahan serai wangi yang ada di Kota Sawahlunto berada di Desa Balai Batu Sandaran yaitu sekitar 34 Ha. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Balai Batu Sandaran, beliau mengatakan bahwa di Desa Balai Batu Sandaran terdapat dua IKM yang mengelola tanaman serai wangi yaitu IKM Atsiri Berkat Yakin dan IKM Mekar Wangi. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari Dinas Koperindag Kota Sawahlunto dalam melakukan pemberdayaan terhadap pelaku IKM di Desa Balai Batu Sandaran.

Dari hasil survey yang penulis lakukan, ada beberapa fungsi lain dari Dinas Koperindag Kota Sawahlunto yang dinilai belum terlaksana dengan baik. Hal itu dapat diidentifikasi dari beberapa fungsi berikut, yaitu 1) belum optimalnya penyelenggaraan fasilitasi dan dukungan produksi industri kecil dan menengah, 2) belum adanya penyelenggaraan pengawasan terhadap mutu produk industri kecil dan menengah, serta 3) masih kurangnya penyelenggaraan dukungan pemasaran dan layanan bisnis lainnya.

Berdasarkan penjelasan dan permasalahan yang ada, maka diperlukannya pembinaan dengan lebih baik dan maksimal dari pemerintah daerah untuk membantu pelaku IKM dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi sehingga memberikan dampak pada perbaikan kualitas produk maupun dalam membuka peluang pasar. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mendeskripsikan

peran, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran pemerintah melalui Dinas Koperindag Kota Sawahlunto dalam pemberdayaan IKM di Desa Balai Batu Sandaran.

Pada saat ini, banyak penelitian tentang peran pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat. (Erwinda, 2022) menjelaskan pengembangan UMKM di Kota Solok oleh Disperindag Kota Solok telah dilakukan sesuai dengan perannya sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Penelitiannya bagus dalam hal pengembangan UMKM di Kota Solok selama pandemi Covid-19. Tetapi ada beberapa permasalahan seperti kurangnya permodalan usaha, keterbatasan SDM, serta lemahnya jangkauan pasar IKM. (Asyiah, 2022) mengutarakan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam pemberdayaan UMKM di Kota Serang yaitu keterbatasan anggaran, kesulitan permodalan, serta keterbatasan SDM seperti konsultan dan tenaga penyuluh. (Fauziyah, 2022) juga menjelaskan bahwa Dinas Perdagkum menghadapi kendala dalam melakukan pembinaan ke IKM di Kabupaten Ponorogo seperti kurangnya jumlah tenaga penyuluh dan pendamping, serta terbatasnya alokasi anggaran untuk pembinaan menyebabkan kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Sejalan dengan hal tersebut (Ardila, 2019) mengutarakan bahwa faktor internal yang menghambat pemberdayaan petani jagung di Nagari Kataping Kabupaten Padang Pariaman adalah rendahnya akses permodalan bagi pelaku IKM. Kemudian faktor penghambat pengembangan IKM di Kota Medan yaitu karena lemahnya jejaring eksternal yang dapat dilihat dari minimnya kemitraan dengan pelaku usaha besar (Putra, 2021). Oleh karena itu, strategi Dinas Koperasi dan UKM dalam memberdayakan UMKM di Kota Manado menjadi bukti berhasilnya peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat (Eman, 2023). (Suarnitha, 2023) mengungkapkan bahwa upaya pemberdayaan IKM di Gianyar oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan inovasi, kreativitas, dan keterampilan tenaga kerja lokal. Hal tersebut terjadi karena IKM telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Disperindag Gianyar. Hal ini juga diperkuat dengan penelitian (Ramadhanti, 2022) bahwa berhasilnya pemberdayaaan UMKM batik di Kabupaten Banyuwangi disebabkan karena adanya dukungan penuh berupa fasilitas dari pemerintah daerah kepada pelaku UMKM batik. Kemudian (Ginting, 2023) mengutarakan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Karo menyediakan pelatihan usaha bagi IKM sebagai upaya dalam memberdayakan IKM di daerah tersebut.

Jadi penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu berfokus pada peran pemerintah melalui Dinas Koperindag Kota

Sawahlunto dalam memberdayakan IKM, khususnya IKM serai wangi di Desa Balai Batu Sandaran.

**Metode**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang dilakukan di Dinas Koperindag Kota Sawahlunto, serta di rumah produksi turunan minyak serai wangi dan pabrik serai wangi yang ada di Desa Balai Batu Sandaran. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan melalui hasil observasi, proses wawancara, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Dinas Koperindag Kota Sawahlunto, IKM Atsiri Berkat Yakin, IKM Mekar Wangi, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kemudian teknik analisis data yang digunakan mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang mana data yang dikumpulkan selama penelitian, dilakukan reduksi atau dirangkum, dipilih informasi yang penting dan relevan, serta dikelompokkan data-data yang sejenis. Setelah proses reduksi, data disajikan dalam bentuk teks narasi. Dan akhirnya kesimpulan diambil dari data yang disajikan sebelumnya.

**Hasil dan Pembahasan**

Adapun peran Dinas Koperindag Kota Sawahlunto dalam upaya pemberdayaan IKM serai wangi di Desa Balai Batu Sandaran dapat dilihat dari beberapa indikator yang dikemukakan (Musa, 2017) sebagai berikut :

a. **Peran sebagai regulator**

   Dinas Koperindag Kota Sawahlunto sebagai regulator dalam memberdayakan pelaku IKM serai wangi di Desa Balai Batu Sandaran, khususnya bidang perindustrian mencoba melakukan percepatan hilirisasi dari komuniti pertanian serai wangi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi bagi pelaku IKM. Adapun kebijakan yang dibuat yaitu kebijakan mengenai pengembangan dan perkuatan teknologi penyulingan, pembuatan produk-produk turunan minyak serai wangi (diversifikasi produk), dan kebijakan fasilitasi pemasaran produk-produk yang ada. Kemudian diberikan juga pelatihan ke pelaku IKM nya terkait peningkatan kualitas minyak serai wangi, pembuatan produk turunan minyak serai wangi, serta pelatihan terkait pemasaran online terhadap produk yang dibuat.

   Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan (Ramadhanti, 2022) yang berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM Batik di Kabupaten Banyuwangi, bahwa sebagai regulator Pemerintah Daerah Banyuwangi mengatur regulasi terkait pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta adanya kebijakan mengenai kemudahan pengajuan pendirian izin usaha.

Kemudian terkait pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperindag kepada pelaku IKM sejalan dengan teori yang dikemukakan (Afriyani, 2018), bahwa strategi pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan edukatif dilakukan dalam bentuk pelatihan. Dengan pelatihan ini, diharapkan dapat meningkatkan keterampilan kelompok sasaran dalam aspek tertentu.

**b. Peran sebagai dinamisator**

Sebagai dinamisator, Dinas Koperindag Kota Sawahlunto berupaya melakukan berbagai usaha untuk memberdayakan pelaku IKM dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, pembinaan, maupun sosialisasi dalam rangka meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas para pelaku IKM serai wangi. Pelatihan terkait pemasaran produk secara online bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar IKM. Namun dari hasil temuan penulis, pelatihan terkait pemasaran online baru diberikan oleh Dinas Koperindag kepada pelaku IKM Atsiri Berkat Yakin, sedangkan kepada pelaku IKM Mekar Wangi belum ada diberikan pelatihan. Tetapi dengan adanya pelatihan-pelatihan lain yang telah diberikan sebelumnya, pelaku IKM Mekar Wangi mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tambahan dalam meningkatkan inovasi produk IKM.

Hal tersebut konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan (Suarnitha, 2023) dengan judul Peran Disperindag dalam Pemberdayaan Industri Kecil Menengah Daerah Gianyar, bahwa pemberdayaan IKM di Kabupaten Gianyar oleh pemerintah berhasil meningkatkan inovasi, kreativitas, dan keterampilan tenaga kerja lokal. Hal ini dicapai melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Disperindag Gianyar. Selain itu, partisipasi IKM lokal dalam pameran dapat membantu memperluas pasar mereka hingga ke luar negeri.

**c. Peran sebagai fasilitator**

Peran pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperindag Kota Sawahlunto sebagai fasilitator salah satunya dengan menyediakan pelatihan dan pembinaan ke pelaku IKM serai wangi baik yang diadakan di dalam Kota Sawahlunto maupun pelatihan ditingkat provinsi seperti di Kota Padang. Dinas juga mendukung pelaku IKM dalam mengakses bantuan modal usaha, yaitu dengan membantu penyusunan proposal usaha agar pelaku IKM mudah dalam mendapatkan bantuan usaha maupun bantuan alat penyulingan serai wangi. Kemudian Dinas Koperindag membantu pelaku IKM dalam mempromosikan produk-produk yang dihasilkan melalui kegiatan pameran, bazar, ataupun event lainnya agar memiliki jangkauan pasar yang lebih luas.

Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang telah dilakukan (Ginting, 2023) yang berjudul Aspek Yuridis Tentang Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Karo, bahwa keberhasilan dalam mengembangkan potensi serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan pelaku usaha di Kabupaten Karo merupakan hasil dari peran aktif Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dinas ini memberdayakan pelaku usaha dengan menyediakan fasilitas pelatihan bagi IKM, membantu akses permodalan dengan mendorong kemudahan persyaratan kredit dari lembaga keuangan, serta memfasilitasi akses pasar ke berbagai daerah lain yang sesuai dengan karakteristik produk mereka.

**Faktor Pendukung Peran Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto dalam Pemberdayaan IKM di Desa Balai Batu Sandaran**

a. Fasilitasi sumber daya finansial

   Dinas Koperindag Kota Sawahlunto membantu dalam menyusun dan mengajukan proposal usaha, sehingga memudahkan pelaku IKM mengakses sumber daya finansial yang dibutuhkan. Selain itu, pelaku IKM juga diberikan peluang untuk melakukan pinjaman modal usaha ke dana bergulir, yaitu pinjaman dengan modal bunga ringan. Namun dari hasil temuan penelitian, Dinas Koperindag belum ada memberikan bantuan modal usaha secara langsung ke IKM serai wangi. Yang mana hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan, inovasi, dan keberlanjutan usaha IKM.

   Faktor pendukung tersebut sejalan dengan penjelasan (Sulistiyani, 2004) bahwa pemberian stimulan berupa dana hibah, baik dalam bentuk hibah murni maupun dana bergulir dimaksudkan bukan untuk mencakup seluruh pembiayaan program, melainkan hanya untuk menyediakan dana tambahan yang tidak bisa dipenuhi sendiri oleh masyarakat. Kemudian diperkuat dengan pendapat yang disampaikan (Ife, 1997), bahwa salah satu potensi yang bisa dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah akses mereka terhadap sumber daya ekonomi atau finansial. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan (Erwinda, 2022), bahwa salah satu faktor pendukung dari Disperindag dalam pengembangan UMKM di Kota Solok selama pandemi Covid-19 adalah pemberian pinjaman modal dengan tingkat bunga yang rendah kepada pelaku UMKM. Peluang ini membantu pelaku IKM dalam mengembangkan usaha mereka dengan biaya pinjaman yang lebih terjangkau.

b. Fasilitasi sarana prasarana

Dinas Koperindag Kota Sawahlunto dalam hal ini juga memfasilitasi pelaku IKM dengan mengajukan proposal ke lembaga pemerintah untuk mendapatkan alat penyulingan beserta bangunan tempat memproduksi produk serai wangi. Dengan adanya fasilitasi sarana prasarana dari Dinas Koperindag, maka dapat mendukung pengembangan usaha IKM serai wangi sehingga kegiatan produksi dapat berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi pelaku IKM.

Sarana dan prasarana adalah faktor penting dalam pemberdayaan masyarakat. Pemerintah berperan dalam pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan sarana dan prasarana melalui pemberian bantuan untuk pengembangan fasilitas tersebut (Windasai, 2021). Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gafur, 2022), yang menunjukkan bahwa solusi untuk masalah yang dihadapi petani serai wangi adalah merancang dan membuat teknologi mesin destilasi serai wangi serta produk-produk turunannya. Mesin ini digunakan untuk memproduksi *hand sanitaizer* dan sabun cuci tangan sebagai kontribusi dalam pencegahan Covid-19 di Desa Teluk Pambang. Dengan adanya mesin destilasi ini, petani dan masyarakat termotivasi untuk meningkatkan produksi serai wangi.

**Faktor Penghambat Peran Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto dalam Pemberdayaan IKM di Desa Balai Batu Sandaran**

a. Minimnya kerja sama

Minimnya kerja sama Dinas Koperindag Kota Sawahlunto dengan pihak lain dalam membantu memasarkan produk IKM, menjadikan IKM serai wangi sulit untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Produk-produk serai wangi yang dihasilkan sulit untuk dipasarkan karena kalah saing dengan produk-produk global yang serupa. Kemudian alat penyulingan yang digunakan pelaku IKM kurang modern dan canggih, sehingga kegiatan produksinya membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal itu juga menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi minyak serai wangi.

Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian yang telah dilakukan (Putra, 2021), bahwa hambatan dalam pengembangan IKM di Kota Medan yaitu kelemahan dalam kelembagaan IKM serta kurangnya jejaring ekternal. Hal ini terlihat dari minimnya kemitraan dengan pelaku usaha besar dan kurangnya kerja sama permodalan dengan pihak-pihak global. Kemudian diperkuat dengan teori yang dikemukakan (Friedman, 1992), bahwa salah satu aspek penting dalam

pemberdayaan adalah mengoptimalkan potensi masyarakat dengan cara menyediakan peluang pasar atau kerja sama dengan phiak lain, serta memperkuat kelembagaan yang ada di masyarakat tersebut.

b. Belum adanya izin legalitas produk
   Produk turunan minyak serai wangi yang dihasilkan oleh IKM Mekar Wangi belum bisa untuk dipasarkan karena belum memiliki izin legalitas atau izin edar untuk dipasarkan kepada masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh IKM Mekar Wangi di Desa Balai Batu Sandaran terkait izin legalitas ini adalah kendala dalam pemenuhan persyaratan tempat produksi yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPOM. Sehingga hal tersebut memberikan kesulitan kepada pelaku IKM dalam memasarkan produknya secara bebas. Serta berdampak pada penghasilan pelaku IKM dan juga jangkauan pasar yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan lanjutan yang mengatur tentang perizinan usaha ini. Karena izin legalitas ini sangat penting bagi pelaku IKM dalam mengembangkan usahanya.
   (Hanif, 2024), legalitas usaha adalah langkah penting yang perlu dilakukan pelaku usaha saat memulai bisnis. Dengan adanya legalitas, bisnis dianggap sah untuk beroperasi karena telah memperoleh izin dari pihak berwenang. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan (Indrawati, 2021), bahwa legalitas usaha adalah aspek penting bagi pelaku usaha untuk memastikan kesinambungan bisnis mereka secara hukum. Legalitas ini penting dalam berbagai aspek, mulai dari pembuktian kepemilikan usaha, perlindungan hukum, promosi produk, hingga mempermudah ekspansi bisnis. Namun proses pengurusan izin legalitas usaha masih belum banyak dipahami oleh masyarakat, khususnya pelaku IKM.
c. Minimnya pemberian pelatihan dan pendamping teknis
   Dinas Koperindag Kota Sawahlunto masih minim dalam memberikan pelatihan kepada pelaku IKM, khususnya kepada IKM Mekar Wangi. hal tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Koperindag dan saat ini Dinas Koperindag menganggarkan dananya untuk IKM makanan, tenun, dan songket. Kemudian dalam memberikan pelatihan terkait pemasaran produk secara online, diperlukannya pendamping teknis yang bisa memberikan pembinaan lebih lanjut kepada pelaku IKM serai wangi.
   Padahal dengan terpenuhinya pelatihan-pelatihan yang diberikan, maka dapat meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam mengembangkan usaha yang

mereka jalani. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan (Suharto, 2009) bahwa proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat diwujudkan melalui penguatan dan dukungan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan masyarakat. Faktor penghambat ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan (Fauziyah, 2022), bahwa dalam upaya pembinaan IKM oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM di Kabupaten Ponorogo, terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti jumlah aparat pembinaan yang terbatas terutama dalam hal tenaga penyuluh dan pendamping. Selain itu, keterampilan aparat pembina IKM juga terbatas, dan anggaran yang tersedia untuk pembinaan tersebut tidak mencukupi, sehingga kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

d. Sulitnya menyamakan pola pikir pelaku IKM

   Kebanyakan pelaku IKM serai wangi di Desa Balai Batu Sandaran masih memiliki pola pikir yang lama atau tradisional. Sehingga mengubah *mindset* pelaku IKM agar lebih terbuka, inovatif, dan proaktif adalah kunci untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu fokus pada pendidikan, pelatihan, dan pendampingan yang dapat membantu pelaku IKM mengembangkan pola pikir yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha IKM.

   Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan (Sitorus, 2023), bahwa seorang pengusaha atau pelaku IKM perlu memiliki pola pikir kewirausahaan (*entrepreneur mindset*). Keberhasilan seorang pengusaha sangat bergantung pada keselarasan pola pikirnya dengan tujuannya. Jika seorang pengusaha ragu dalam mengambil keputusan, itu menandakan bahwa *mindset* nya tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, *mindset* kewirausahaan sangat penting untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat tanpa adanya keraguan.

Berikut beberapa contoh produk yang dihasilkan IKM serai wangi di Desa Balai Batu Sandaran.

**Gambar 1.** Minyak Serai Wangi **Gambar 2.** Sabun Mandi Cair **Gambar 3.** Sabun Mandi Padat

**Gambar 4** Sabun Cuci Piring

**Gambar 5** Detergen Cair

**Gambar 6** Pewangi Pakaian

**Sumber:** Observasi Lapangan (2024)

**Keterangan:** Gambar ini menunjukkan produk-produk yang dihasilkan IKM serai wangi di Desa Balai Batu Sandaran. Minyak serai wangi adalah produk yang dihasilkan oleh IKM Atsiri Berkat Yakin. Sedangkan sabun mandi, sabun cuci piring, detergen cair, dan pewangi pakaian adalah produk turunan dari minyak serai wangi yang dihasilkan IKM Mekar Wangi.

## Kesimpulan

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto sudah melaksanakan perannya dalam memberdayakan pelaku IKM serai wangi di Desa Balai Batu Sandaran. Hal tersebut dapat diketahui dari tiga indikator peran yaitu peran sebagai regulator, peran sebagai dinamisator, dan peran sebagai fasilitator. Peran Pemerintah Kota Sawahlunto melalui Dinas Koperindag Kota Sawahlunto memang sudah dilakukan, akan tetapi peran tersebut masih kurang maksimal dalam penyelenggaraannya karena masih terdapat sejumlah faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan peran tersebut seperti keterbatasan modal usaha, akses pasar, izin legalitas produk, dan keterampilan manajerial. Adapun saran yang dapat diajukan dari penelitian ini yaitu diharapkan Dinas Koperindag Kota Sawahlunto dapat terus memberikan pelatihan dan pembinaan berkelanjutan, memfasilitasi akses pasar yang lebih luas, serta perlu adanya perubahan dan penyamaan *mindset* atau pola pikir pelaku IKM serai wangi agar lebih terbuka terhadap hal-hal baru, mampu menghadapi tantangan, dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada.

**Daftar Pustaka**

Afriyani, A. Y. (2018). *Pengelolaan Ekosistem Mangrove Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.* Tegal: Widyasiwara BPPP.

Ardila, D. & Eriyanti, F. (2019). Pemberdayaan Petani Jagung oleh Stakeholders di Nagari Kataping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, *3*(2), 31-44.

Asyiah, S. L. (2022). Peran Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Serang. *Jurnal Kewarganegaraan*, *6*(4), 6695-6704.

Eman, F. T., Rachman, I., & Pangemanan, F. N. (2023). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Manado (Studi Kasus di Dinas Koperasi dan UKM Kota Manado). *Jurnal Governance*, *3*(1), 1-10.

Erwinda, H. C & Mubarak, A. (2022). Peran Disperindag Kota Solok dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Solok Pada Masa Pandemi Covid-19. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studie*, *1*(3), 206-211.

Fauziyah, J. & Ramadhani, S. A. (2022). Mengoptimalisasikan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Melalui Bidang Industri Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (PERDAGKUM). *(JTEB) Jurnal Terapan Ekonomi dan Bisnis*, *2*(2), 38-44.

Friedman, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development.* Cambridge: Blackwell Publishers.

Gafur, A. & Sriwahyuni, E. (2022). Pelatihan Penyulingan Serai Wangi dan Pembuatan Produk Turunan Menjadi Handsanitiser dan Sabun Cuci Tangan Kelompok Tani Desa Teluk Pambang, Bengkalis. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*, 2(1), 17-22.

Ginting, S., Siregar, S. A., & Nasution, M. Y. (2023). Aspek Yuridis Tentang Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Karo. *Jurnal Retentum*, *5*(2), 215-225.

Hanif, A. & Swasti, I. K. (2024). Penguatan Legalitas Usaha Melalui Pembuatan Nomor Induk Berusaha di Sentra Wisata Kuliner Penjaringansari. *Ekspresi: Publikasi Kegiatan Pengabdian Indonesia*, *1*(3), 103-112.

Ife, J. (1997). *Community Development: Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice.* Melbourne: Longman.

Indrawati, S. & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, *1*(3), 231-241.

Musa. (2017). Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tawaran dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, *8*(1), 107-125.

Putra, R. A., Nasution, M. A., & Suriadi, A. (2021). Analisis Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengembangan Industri Kecil di Kota Medan. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, *8*(1), 47-52.

Ramadhanti, A., Wahyuni, S., & Zulianto, M. (2022). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM Batik di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial*, *16*(1), 47-52.

Sitorus, G., Nasution, Y., Nancy, L., Siregar, E., & Nainggolan, A.. (2023). Entrepreunership Mindset Bagi Pelaku Usaha Pemula di Lingkungan Suku Dinas Koperasi dan UKM Jakarta Selatan. *Jurnal Sinergi*, *5*(1), 7-15.

Suarnitha, N. P. E. P., Ariwangsa, I. O., & Lasmi, N. W. (2023). Peran Disperindag dalam Pemberdayaan Industri Kecil Menengah Daerah Gianyar. *Jurnal Abdimas Mandiri*, *7*(2), 105-114.

Suharto, E. (2009). *Pekerja Sosial & Kesejahteraan Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan.* Yogyakarta: Gava Media.

Windasai, W., Said, M. M. U., & Hayat, H. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *2*(3), 793-804.